

**RELASI KUASA DAN DAMPAK EKONOMI DALAM KEBIJAKAN  
RELOKASI PASAR PAGI TUMENGGUNGAN DI KABUPATEN  
KEBUMEN**

**Riska Melyana\*) & Kushandajani\*\*)**

Email: [riskatuk123@gmail.com](mailto:riskatuk123@gmail.com)

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos : 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> , Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**Abstract:**

*The Central Government's Assistance Fund aims to support development and public services in each region, especially Kebumen Regency through the policy of revitalizing traditional markets. This is a form of extension of the central government given to the Regent as the Head of Region which is part of the II Development Phase. The policy of relocation and revitalization of the Morning Market to the Colt Kebumen Stand has created socio-economic dynamics for the community, especially traders and public transportation drivers. In addition, the participation and role of each actor greatly determines the direction of the policy. The approach method used during the study was qualitative to make it easier for the author to explore, analyze and interpret each statement obtained from individuals or groups. Data collection techniques during the work process were carried out through observation, interviews and documentation. The results of the study showed that the relocation and revitalization of the Morning Market to the Colt Stand has had a social and economic impact on the community, especially traders and public transportation drivers. In addition, the participation and role of the actors greatly determine the implementation of the policy. During the policy implementation process, the Regent played a role in every decision-making together with the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Kebumen Regency. Not only that, the research results found that the central government as one of the policy actors has a central role in terms of fund allocation through the State Budget (APBN), supervision, and technical assistance for the revitalization of the Morning Market at Stanplat Colt Kebumen.*

**Keywords:** *relocation and revitalization, traditional market, power relations*

**Abstrak:**

Dana Tugas Pembantuan pemerintah pusat bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tiap daerah khususnya Kabupaten Kebumen melalui kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Hal tersebut merupakan bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah yang dibagi atas II Tahap Pembangunan. Kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi ke Stanplat Colt Kebumen melahirkan dinamika sosial-ekonomi bagi masyarakat khususnya para pedagang dan supir angkutan umum. Selain itu, partisipasi dan peran tiap aktor sangat menentukan arah kebijakan. Metode pendekatan yang digunakan selama penelitian yaitu kualitatif untuk memudahkan penulis dalam mengeksplorasi, menganalisis dan menginterpretasikan setiap pernyataan yang didapat dari individu maupun kelompok. Teknik pengumpulan data selama proses pengerjaan dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi ke Stanplat Colt menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat khususnya para pedagang dan supir angkutan umum. Selain itu, partisipasi dan peran dari para aktor sangat menentukan pelaksanaan kebijakan. Selama proses pelaksanaan kebijakan, Bupati berperan dalam setiap pengambilan keputusan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Tidak hanya itu, dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah pusat sebagai salah satu aktor kebijakan yang memiliki peran sentral dalam hal alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pengawasan, dan pendampingan teknis revitalisasi Pasar Pagi di Stanplat Colt Kebumen.

**Kata Kunci:** relokasi dan revitalisasi, pasar tradisional, relasi kuasa

## **A. PENDAHULUAN**

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan pembangunan maupun revitalisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan kebijakan Revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan di lahan yang sebelumnya digunakan sebagai Stanplat Colt Kebumen menggunakan dana APBN yang berasal dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan atau Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembangunan Tahun Anggaran 2023 dengan tujuan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) serta komitmen yang kuat dari para pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2). Total anggaran dalam proses Revitalisasi Pasar Pagi di Stanplat Colt sebanyak Rp3 Milyar.

Semula, Pasar Pagi Pasar Tumenggungan Kebumen bertempat di pelataran Pasar Tumenggungan dan menempati lahan parkir yang dikelola oleh pihak swasta dengan jam operasional dimulai pada pukul 01.00 sampai 07.00 WIB. Beberapa hal yang melatar belakangi Relokasi Pasar Pagi diantaranya yaitu munculnya konflik antara pedagang dan pengelola parkir berupa pungutan liar atau penjualan lahan dagang sebagai bentuk sewa lahan parkir kepada para pengelola lahan parkir. Selain itu, pemindahan Pasar Pagi Tumenggungan ke Stanplat Colt Kebumen dinilai sangat representatif. Hal ini dilihat dari luas area yang memadai, dan mudahnya aksesibilitas para pedagang selama proses berjualan. Selain itu, dengan dilakukannya relokasi Pasar Pagi ini diharapkan dapat mendorong aktivitas perekonomian di Stanplat Colt dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang sebelumnya sudah ada di area salah satunya ruko-ruko yang saat ini banyak yang tutup.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Teori Relasi Kuasa Hegemoni**

Relasi kuasa pada konsep Hegemoni menurut Antonio Gramsci (1929-1935) dalam Faruk (2014:132) adalah sebuah gagasan yang menganggap “kepemimpinan” adalah hegemoni secara literal. Gagasan dan opini-opini tidak muncul dengan sendirinya dari otak individu melainkan memiliki pusat informasi, iradiasi, penyebaran dan persuasi. Hegemoni merupakan hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok pemimpin yang bersifat kompleks diikuti dengan kekuasaan yang menguasainya secara sukarela tanpa adanya kekerasan dan penindasan. Hegemoni kelas penguasa dengan hegemoni yang dikuasainya pada dasarnya dibangun berdasarkan mekanisme konsensus atau persetujuan antar kelas sosial secara spontanitas psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Sehingga dengan kata lain, relasi kuasa hegemoni muncul melalui kesepakatan atau persetujuan antar kelas sosial tanpa melalui kekerasan atau penindasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Konsensus ini selama berjalannya waktu digunakan sebagai bentuk “komitmen aktif” berdasarkan pandangan bahwa posisi tinggi yang ada adalah sah atau *legitimate* dan ditaati oleh setiap kelas-kelas yang ada sehingga tidak ada pertentangan (Amaliyah, 2019).

Gagasan atau ide dalam hegemoni dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk menjembatani sastra yang memiliki peran merangkai gagasan-gagasan disandingkan, diartikulasikan, dipelesetkan maupun ditegaskan. Teori hegemoni menjelaskan bahwa transformasi atau perubahan bukanlah peristiwa yang singkat namun melalui proses perjumpaan dan negosiasi dari berbagai intelektual organik dengan kelompok subaltern. Selain itu, Gramsci juga meyakini bahwa ideologi merupakan isi dari hegemoni yang berfokus pada pembentukan kesadaran massa dengan menegaskan bahwa perkembangan politik dan budaya kelas subaltern tidak dilakukan dengan spontan tetapi dengan kesadaran (Rosman Tami, 2021).

#### **Negara dan Masyarakat Sipil (*civil society*)**

Hegemoni Gramsci dalam (Salahudin J. , 2014) menjelaskan bahwa negara merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan masyarakat sipil dengan

struktur ekonomi. Negara merupakan hal yang kompleks dari aktifitas praktis dan teoritis dimana kelas penguasa tidak hanya mempertahankan dominasinya namun memperoleh persetujuan dari kelompok yang berada di bawah kekuasaannya dengan menanamkan ideologi mereka sebagai (*common sense*) agar tanpa sadar masyarakat dapat menerimanya. Gramsci membedakan negara menjadi dua bagian yaitu masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat politik.

Masyarakat sipil dalam (Yusuf, 2017) adalah wadah perjuangan kelas dan demokrasi kerakyatan. Selain itu, masyarakat sipil juga wadah bagi kelompok sosial dominan dalam mengatur konsensus dan hegemoni sekaligus wadah kelompok sosial yang lebih rendah (*subordinate*) dalam menyusun perlawanan mereka untuk membangun sebuah hegemoni alternatif (*counter-hegemony*). Di dalam kelompok masyarakat sipil seringkali terdiri dari semua organisasi swasta yang bersifat sukarela seperti serikat pedagang, lembaga pendidikan, partai politik, organisasi masyarakat maupun organisasi amal.

Sedangkan pengertian masyarakat politik menurut Gramsci dalam (Simon, 1999) masyarakat politik ditujukan kepada hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing termasuk dalam fungsi koersif. Hubungan-hubungan koersif tersebut terwujud dalam berbagai lembaga negara; angkatan bersenjata, polisi, lembaga administrasi yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan sosial, dan sebagainya yang bergantung kepada upaya akhir dari efektifitas monopoli negara dalam melakukan tindakan koersif tersebut. Sehingga pada dasarnya, masyarakat sipil (*civil society*) dan negara terbentuk melalui berbagai hubungan sosial dimana negara dalam hal koersif menjelma menjadi organisasi terstruktur. Karena negara memiliki kekuatan koersif, maka dengan sangat mudah untuk menghegemoni masyarakat sipil ditambah beberapa organisasi di dalam masyarakat sipil merupakan wujud dari masyarakat politik (negara) seperti lembaga pendidikan dan ikatan profesi aparatur yang secara struktural di bawah kekuasaan negara karena meskipun lembaga pendidikan merupakan bagian dari masyarakat sipil. Sehingga, masyarakat sipil dan masyarakat politik tidak bisa dipahami sebagai bagian terpisah yang tidak memiliki hubungan.

## 2. Teori Dampak Kebijakan Ekonomi

Dampak menurut Soemarwoto dalam Wahyuni (2017) merupakan perubahan yang terjadi akibat suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Dampak memiliki dua jenis yaitu dampak positif dan dampak negatif. Banyak faktor yang menentukan dampak tersebut masuk dalam kategori positif atau negatif, salah satunya dapat dilihat apakah kebijakan tersebut menguntungkan atau merugikan seseorang. Menurut Irawan dalam (Sari, 2015) dampak adalah suatu perubahan yang terjadi secara fisik maupun sosial akibat dari adanya penetapan suatu kebijakan di tengah masyarakat. Dampak mencakup dari suatu intervensi program untuk kelompok sasaran tertentu baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan, serta sejauh mana akibat tersebut mampu melahirkan pola perilaku baru pada masyarakat.

Untuk mengetahui terjadinya suatu dampak ekonomi akibat output kebijakan, maka dampak ekonomi dikelompokkan menjadi tiga menurut indikator Stynes dalam Nayoan (2021):

1. *Direct effect*, pada indikator meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak dan tingkat pendapatan.
2. *Indirect effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu, jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti, variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan.
3. *Induced effect*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.

Selain dari ketiga indikator di atas, menurut Cohen dalam Agustina (2016) dampak ekonomi juga dapat berupa dampak terhadap pendapatan, dampak terhadap aktivitas ekonomi, dan dampak terhadap pengeluaran. Dampak juga dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga menampilkan berbagai perspektif.

### C. TUJUAN PENELITIAN

Menganalisis keterlibatan antar aktor dalam konsep Hegemoni Antonio Gramsci terhadap kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen serta dampak ekonomi selama proses relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Dari pengertiannya secara umum, observasi atau biasa disebut pengamatan adalah tindakan peneliti dalam menelusuri atau mencari tahu sesuatu hal yang terjadi dari suatu fenomena. Menurut Margono (2020), observasi merupakan teknik melihat dan mengamati berbagai perubahan atau fenomena sosial yang terus terjadi dan berkembang. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul melalui data yang dikumpulkan.

#### **b. Wawancara**

Wawancara menurut Bungi (2013, 133) adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan melakukan suatu penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan narasumber.

#### **c. Dokumentasi**

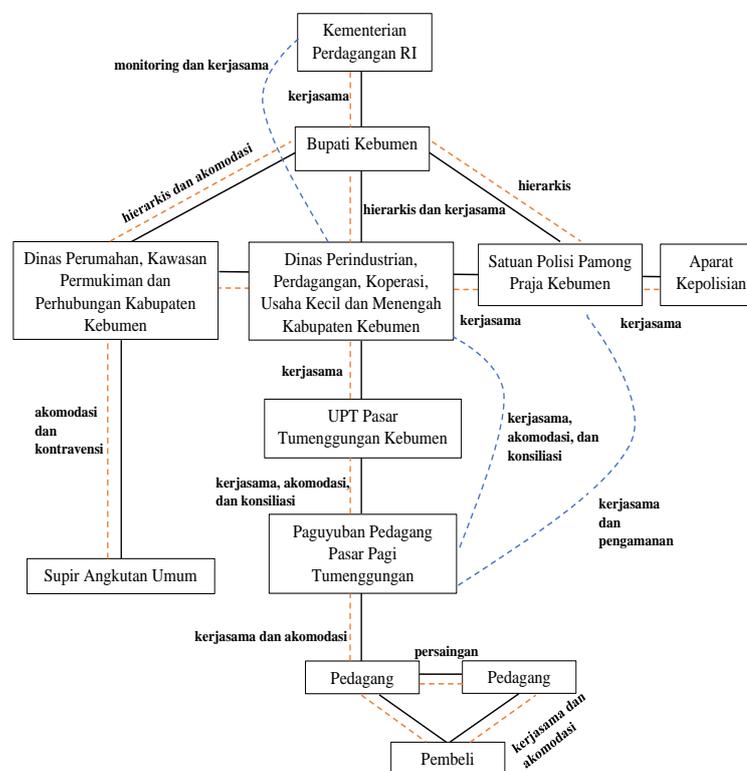
Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi berupa gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya. Teknik dokumentasi yang diambil oleh peneliti sendiri bersumber dari dokumen atau arsip website terkait, berita online dan dokumentasi lapangan secara langsung yang didapat oleh peneliti saat melakukan penelitian.

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Relasi Kuasa Hegemoni

Selama proses berlangsungnya kebijakan Relokasi dan Revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen, hubungan yang terjalin sangat dinamis dan dipengaruhi oleh fungsi masing-masing lembaga negara. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam mendukung kebijakan melalui kesepakatan pendanaan Revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan yang berlokasi di Stanplat Colt Kebumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat menggunakan APBN tahun 2023 untuk tahap pertama dan 2024 di tahap kedua. Kemudian Bupati yang sedang menjabat saat itu Bapak Arif Sugiyanto sebagai aktor pengambil keputusan bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Tumenggungan. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian melalui struktur relasi kuasa antar aktor sebagai berikut :

**Gambar 3.1** Relasi Kuasa Antar Aktor Kebijakan



Tidak hanya itu, peneliti juga mendeskripsikan peran dan keterlibatan para aktor lembaga negara dan masyarakat sipil (*civil society*) selama proses relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan para aktor yang terlibat. Hasil penelitian berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara dengan tiap informan sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Peran Lembaga Negara dan Masyarakat Sipil (*civil society*) selama Proses Relokasi dan Revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan

<i>Power</i>	<b>Aktor</b>	<b>Peran tiap aktor selama proses Relokasi dan Revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan</b>
<i>1 (sangat tinggi)</i>	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyepakati dan mendanai Kebijakan Revitalisasi atau Pembangunan Stanplat Colt sebagai Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen melalui dana TP APBN 2023.</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi</li> <li>- Melakukan auditing serta pengawasan selama proses pembangunan</li> </ul>
<i>2 (tinggi)</i>	Bupati Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambil keputusan utama</li> <li>- Penanggung jawab utama proses relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan</li> </ul>
<i>3 (sedang-tinggi)</i>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencana teknis terkait relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan</li> <li>- Pelaksana teknis lapangan terkait lay out, penataan pedagang,</li> <li>- Pengawasan proses relokasi dan revitalisasi</li> </ul>
<i>4 (sedang)</i>	UPT Pasar Tumenggungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan para pedagang dan mengetahui kondisi lapangan</li> <li>- Penghubung antara Disperindag dengan paguyuban dan pedagang pasar pagi Tumenggungan</li> </ul>
<i>5 (sedang-rendah)</i>	Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Tumenggungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wadah untuk menampung pendapat dan keluh kesah para pedagang pagi sekaligus penghubung dengan pemerintah daerah</li> <li>- Memperjuangkan kepentingan para pedagang pasar pagi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalin kerjasama dengan dinas terkait</li> <li>- Ikut serta membantu proses perencanaan relokasi dan revitalisasi pasar pagi</li> <li>- Ikut serta membantu dalam perencanaan teknis penataan pedagang di lapangan</li> </ul>
6 (sedang-rendah)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi lapangan dan berperan sesuai tupoksinya selama proses relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan.</li> <li>- Ikut dalam perencanaan penataan pasar pagi.</li> <li>- Mensosialisasikan kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi kepada para supir angkutan umum.</li> <li>- Menampung aspirasi dan keinginan dari para supir angkutan umum.</li> </ul>
7 (sedang-rendah)	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keamanan selama pelaksanaan relokasi Pasar Pagi Tumenggungan agar tetap kondusif.</li> <li>- Menerima aduan dari para aktor yang terlibat.</li> <li>- Menindaklanjuti laporan yang diterima.</li> <li>- Melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan</li> </ul>
8 (rendah)	Paguyuban Supir Angkutan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menaati kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi yang ditetapkan.</li> <li>- Melakukan lobbying atau menyampaikan keinginan terkait Stanplat Colt baru kepada Pemerintah Daerah.</li> <li>- Mendukung keputusan yang sudah ditetapkan.</li> </ul>
9 (sangat rendah)	Pedagang Pasar Pagi Tumenggungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan pendapat.</li> <li>- Mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan.</li> </ul>
10 (sangat rendah)	Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan.</li> </ul>

### **a. Negara**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa terdapat hubungan antar lembaga negara yang kuat dalam bidang perdagangan yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bersama Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Tumenggungan melalui koordinasi kuat selama menjalankan tugas dan fungsinya termasuk fungsi koersif guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan. Sehingga pada dasarnya, masyarakat sipil (*civil society*) dan negara terbentuk melalui berbagai hubungan sosial dan politik dimana negara dalam hal koersif menjelma menjadi organisasi terstruktur. Selain itu kelas penguasa tidak hanya mempertahankan dominasinya namun memperoleh persetujuan dari kelompok yang berada di bawah kekuasaannya dengan menanamkan ideologi mereka sebagai (*common sense*) agar tanpa sadar masyarakat dapat menerimanya tanpa melalui paksaan ataupun tindak kekerasan.

### **b. Masyarakat Sipil (*civil society*)**

Dari hasil penelitian, (*subordinate*) cenderung mengikuti segala hasil keputusan dari kelompok dominan karena tidak memiliki power dan akses yang cukup terhadap sumber daya sehingga membatasi kemampuan mereka untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan lembaga negara dan kelompok dominan. Meskipun demikian, pada dasarnya mereka memiliki keinginan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui tindakan revolusioner kelas pekerja. Kelas pekerja adalah mereka yang tidak memiliki kuasa dan akses yang cukup atas lahan, modal dan sumber daya lainnya. Mereka merupakan pedagang kecil yang memiliki modal terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Namun dari hasil penelitian selama proses pelaksanaan kebijakan relokasi, Paguyuban dan supir angkutan umum merupakan kelompok yang tidak memiliki akses yang luas terhadap sumber daya seperti ekonomi, politik dan sosial. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kelompok dominan yaitu Paguyuban Pedagang Pasar Pagi selama proses relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan. Selain itu, kurangnya representasi politik dan relasi kuasa dengan lembaga negara membuat mereka sulit untuk mempengaruhi kebijakan.

Hal tersebut tentu tidak menguntungkan bagi para supir angkutan umum. Terjadi konflik batin yang dirasakan oleh mereka karena kehilangan Stanplat Colt sebagai sarana prasana pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Angkutan Umum sehingga memicu ketegangan, kebingungan, dan ketidakpastian bagi para supir angkutan umum. Karena lahan yang sebelumnya biasa digunakan untuk parkir angkutan terganggu akibat digunakan oleh para pedagang untuk aktivitas berjualan sehingga secara tidak langsung menimbulkan persaingan kepentingan antar kelompok.

## 2. Dampak Ekonomi

### a. Pendapatan

Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti diatas, relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan ke Stanplat Colt meningkatkan pendapatan bagi daerah cukup signifikan. Hal tersebut karena terdapat perubahan dasar regulasi yang digunakan untuk menarik tarif retribusi kepada para pedagang yang semula mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan tarif Los Tipe Pasar A sebesar 400 per per m<sup>2</sup>/hari yang berlaku sampai akhir bulan Desember tahun 2023, berubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No 11 Tahun 2023 yaitu masuk ke Los Tipe A dengan tarif 475 per m<sup>2</sup>/hari berlaku sampai saat ini. Selain itu, karena pasar pagi ketika masih berada di Pasar Tumenggungan mayoritas menempati lahan parkir sehingga retribusi tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah namun kepada pihak ketiga pemenang tender lahan parkir di Pasar Tumenggungan. Namun setelah pembangunan Pasar Pagi di Stanplat Colt selesai dan para pedagang secara resmi menempati lokasi tersebut maka semua pedagang wajib untuk membayar retribusi pelayanan pasar sehingga Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Pasar mengalami peningkatan.

**Tabel 3.2** Data Retribusi Pendapatan Pasar Tumenggungan Tahun 2022 sampai Tahun 2024

<b>Pendapatan Retribusi Pasar Tumenggungan</b>			
<b>Bulan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

Januari	Rp123.360.200	98.852.200	Rp103.724.400
Februari	Rp79.488.000	98.112.400	Rp125.633.000
Maret	Rp120.042.600	116.094.700	Rp97.781.550
April	Rp81.236.200	68.508.200	Rp116.754.200
Mei	Rp105.186.400	118.932.000	Rp151.958.200
Juni	Rp135.477.200	89.209.000	Rp124.456.400
Juli	Rp100.606.600	91.782.800	Rp148.652.450
Agustus	Rp113.530.000	121.965.600	Rp127.826.450
September	Rp123.417.476	110.623.800	Rp84.895.850
Oktober	Rp134.375.300	106.983.000	Rp120.783.900
November	Rp165.400.700	107.027.200	Rp121.302.942
Desember	Rp130.428.100	127.925.100	Rp145.380.350
<b>Total</b>	<b>Rp1.412.548.776</b>	<b>1.256.016.000</b>	<b>Rp1.469.149.692</b>

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

**Tabel 3.2** Data Pendapatan Retribusi Rakyat Pagi Kebumen Tahun 2024

<b>Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat Pagi Kebumen Tahun 2024</b>	
Januari	16.929.000
Februari	17.111.000
Maret	17.121.800
April	13.969.700
Mei	22.653.100
Juni	19.397.500
Juli	29.323.500
Agustus	26.579.700
September	21.494.100
Oktober	23.667.100
November	21.416.000
Desember	24.253.900
<b>Total</b>	<b>253.916.400</b>

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

## b. Pengeluaran Ekonomi

Pengeluaran yang dikeluarkan oleh para pedagang dilihat dari modal dan biaya operasional yang mereka keluarkan selama proses relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan dengan hasil penelitian bahwa relokasi dan revitalisasi pasar pagi sangat berdampak terhadap para pedagang pasar pagi khususnya pedagang kecil terkait modal yang harus dikeluarkan tiap harinya. Pengeluaran tersebut tentu berhubungan dengan penghasilan yang didapatkan karena mayoritas para pedagang memutar uang hasil penjualan untuk modal berjualan di hari berikutnya sehingga perputaran ekonomi selama proses relokasi dan revitalisasi yang dirasakan oleh para pedagang sangat terhambat. Kemudian, pernyataan para pedagang tersebut tersebut peneliti deskripsikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

**Tabel 3.4** Deskripsi Pernyataan Modal Ibu Laila selama berdagang di Pasar Pagi

<b>Lokasi</b>	<b>Berat</b>	<b>Waktu</b>
Pasar Tumenggungan	65 kg	5 hari
Relokasi I (Stanplat Colt )	30 kg	10 hari
Relokasi ke II (Stadion Chandradimuka)	30 kg	14 hari
Relokasi ke III (Menempati lahan resmi Pasar Pagi di Stanplat Colt Kebumen)	25 kg	5-14 hari

Sumber: Pernyataan Ibu Laila  
(Pedagang Bumbu Dapur Pasar Pagi Kebumen)

Biaya operasional selama proses relokasi Pasar Pagi Tumenggungan diatas berasal dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen. Jadi meskipun di tahun 2024 pendapatan dari Pasar Pagi Tumenggungan yang didapatkan melalui pelayanan Pasar Rakyat Pagi sebesar Rp253.916.400,00 belum menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen karena belum menutup pengeluaran yang dikeluarkan daerah selama proses relokasi Pasar Pagi Tumenggungan ke Stanplat Colt Kebumen.

### **c. Aktivitas Ekonomi**

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, tidak ada perubahan aktivitas ekonomi akibat kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan yang dirasakan oleh para pedagang dan supir angkutan umum. Namun, perubahan aktivitas ekonomi dirasakan oleh para pembeli yang cukup kesulitan menemukan pedagang langganan yang biasa mereka beli setiap relokasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, segala upaya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan relokasi Pasar Pagi Tumenggungan sehingga dampak yang dirasakan tidak terlalu besar bagi para pembeli.

## **F. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, relasi kuasa yang muncul antara lembaga negara dengan masyarakat sipil (*civil society*) yaitu Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Tumenggungan berdasarkan adanya kepentingan serta keinginan untuk melakukan perubahan dari para kelas pekerja. Sehingga, hubungan relasi kuasa yang muncul tersebut membuktikan bahwa masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat politik tidak bisa dipisahkan. Hubungan antar aktor yang terjalin selama proses relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan ke Stanplat Colt sangat dinamis. Permasalahan yang dihadapi para supir angkutan umum akibat Stanplat Colt yang dijadikan sebagai lokasi Pasar Pagi Tumenggungan belum menemukan titik terang. Kurangnya akses terhadap sumber daya dan relasi kuasa menjadikan mereka sebagai kelompok yang tidak memiliki ruang aspirasi lebih untuk mempengaruhi proses perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan. Meskipun demikian, pembangunan Stanplat Colt selanjutnya direncanakan akan dilakukan berdampingan dengan lokasi Pasar Pagi, namun belum ada kepastian terkait dana dan waktu pelaksanaannya.

Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan dampak ekonomi yang dirasakan oleh tiap aktor dimana kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan ke Stanplat Colt sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pasar Pagi merupakan bagian dari pasar tradisional yang berfungsi sebagai pendorong roda ekonomi utama masyarakat sekaligus tempat distribusi barang dan jasa di tingkat lokal. Proses relokasi menyebabkan penurunan pendapatan para pedagang. Beberapa pedagang yang tidak mampu melewati dinamika kebijakan tersisih, sedangkan pedagang yang mampu beradaptasi dan melewatinya mulai merasakan manfaat setelah revitalisasi pasar pagi selesai. Peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh para pedagang dibandingkan ketika masih di Pasar Tumenggungan sebesar 60%, hal terjadi karena fasilitas yang tersedia saat ini di lokasi baru lebih memadai. Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perdagangan memiliki peran sentral sekaligus memiliki kekuasaan tertinggi dalam proses pendanaan dan pengawasan kebijakan Revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan.

## **G. SARAN**

1. Selama proses perencanaan dan pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah seharusnya bisa lebih melibatkan para supir angkutan umum serta memberikan

ruang aspirasi terhadap mereka. Saran ini peneliti berikan bukan tanpa alasan karena tempat yang saat ini digunakan sebagai berdagang para pedagang Pasar Pagi Tumenggungan sebelumnya adalah Stanplat Colt atau Terminal Kota Tipe C. Aspirasi ini nantinya dapat memberikan solusi bagi para supir angkutan umum supaya mereka tidak kesulitan karena Stanplat Colt saat ini digunakan sebagai Pasar Pagi.

2. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, agar proses relokasi Pasar Pagi Tumenggungan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, sudah seharusnya Pemerintah Daerah memiliki regulasi atau pedoman pelaksanaan relokasi agar dapat meminimalisir konflik kepentingan antar aktor.
3. Untuk menghilangkan permasalahan terkait pungutan liar di lingkungan para pedagang Pasar Rakyat Pagi Kebumen, alangkah baiknya Pemerintah Daerah memberikan pemahaman terhadap para pedagang dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran mereka supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab salah satunya sosialisasi.
4. Membuat peraturan dan regulasi terkait larangan jual beli lahan di Pasar Rakyat Pagi Kebumen yang bekerja sama dengan semua aktor yang terlibat sehingga proses penataan pasar berjalan secara optimal dan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Amaliyah, Nabilah. (2019). "Kekuasaan Dalam Novel Sepohon Kayu di Tengah Gurun Karya Harry D Mohan (Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)".
- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta: Suara Bebas.
- Adjar.id. Prafitasari, Aldita. (2023). "10 Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli". Diakses 23 November 2023.
- Agustina, Isna Fitria. "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon". JKMP. Vol. 4, No. 2, Hal. 117-234. September 2016.
- Heksantoro, Rinto. detikJateng (2022). Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen Bakal Dipindah. Diakses 15 September 2023 .
- Kebumen Ekspres. (2021/05). "Stanplat Colt Kini Merana, Kabarnya Mau Jadi Pasar Pagi". Diakses 15 September 2023.
- Kebumen Ekspres. (2023/6). Stanplat Colt Diguyur Rp 2,7 Miliar, Pembangunan Pasar Pasar Pagi Dimulai. Diakses 17 September 2023.
- KebumenEksperes.com. (2022). "Stanplat Colt Kebumen Resmi Jadi Pasar Pagi". Diakses 11 Februari 2023.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2023). Satu Data Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Diakses 3 Oktober 2023.
- Peraturan Bupati Kebumen No. 70 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tumenggungan Kebumen. Diakses 5 April 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Saran Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Salahudin, Jainuri. (2014). "Negara Versus Masyarakat Sipil di Aras Lokal Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Negara Dalam Penyusunan Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern di Kota Malang". Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Penerbit Mata Padi Presindo. Yogyakarta.

Tami, Rosmah. Zurmailis, dkk. (2021). "Hegemoni (Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya Indonesia)". Alauddin University Press. Kabupaten Gowa.

Yusuf, Mansyur. (2017). "Hegemoni Dalam Novel Berkisar Merah Karya Ahmad Tohari (Suatu Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)." Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Dan Sastra Universitas Negeri Makassar".